

JAGA KUALITAS INVESTASI Wonogiri Raih Penghargaan

WONOGIRI (KR) - Pemkab Wonogiri meraih penghargaan *Public Service of The Year 2020* dari Mark Plus pimpinan Hermawan Kartajaya yang dikenal sebagai begawan marketing Indonesia. Selama empat tahun terakhir, tepatnya sejak 2016, di daerah itu berdiri 5.620 usaha dengan nilai investasi sekitar Rp 12 triliun.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Wonogiri, Drs Eko Subagyo MM, penghargaan tersebut diberikan karena Pemkab Wonogiri dinilai selektif menjaga kualitas investasi. Yakni mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mitigasi dampak lingkungan di garda terdepan.

Kasi Pengolahan Data DPMPTSP, Sriyanto SE ME menambahkan, pada kurun waktu 2016-2020 ada 5.620 UMKM baru di Kabupaten Wonogiri. Rinciannya, saha skala mikro 43 persen, usaha kecil 42 persen, usaha menengah 14 persen, dan usaha besar 1 persen.

"Realisasi nilai investasi mencapai Rp 12 triliun lebih atau naik dua kali lipat dibanding target Rp 6 triliun. Investasi ini mampu menyerap 47.111 tenaga kerja," jelasnya, Senin (30/11). (Dsh)

DI KABUPATEN KARANGANYAR 70.397 UMKM Ajukan BPUM

KARANGANYAR (KR) - Pendaftaran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) di Karanganyar ditutup di gelombang 12. Jumlah pendaftar dari gelombang pertama hingga terakhir 70.397 unit. Kabid Koperasi dan UKM Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, Adolfus Joce Bau mengatakan data tersebut nantinya langsung disetorkan ke Pemrov Jateng untuk diproses ke tingkat pusat.

Berdasarkan data yang dihimpun, pendaftar BPUM tahap pertama hingga tahap kelima sebanyak 28.772 usaha, pendaftaran tahap keenam 5.962 usaha, dan tahap ketujuh 13.303 usaha. Ditambah dengan pendaftar tahap delapan hingga ke-12, ada 22.360 usaha, sehingga ada 70.397 usaha yang diajukan berkasdi Pemkab Karanganyar," jelas Adolfus Joce.

Menurutnya, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam pemberkasan namun tetap diajukan ke Pemkab. Pendaftaran tahap ke-12 BPUM di Karanganyar merupakan tahap terakhir dan ditutup Kamis (26/11) pukul 12.00 WIB, sedangkan pemberkasan di Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar ditutup pukul 14.00 WIB. (Lim)

DISETUJUI PEMKAB DAN DPRDD Raperda APBD Banjarnegara Rp 2,183 T



BANJARNEGARA (KR)

- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Banjarnegara. Persetujuan ditandai penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Ismawan Setya Handoko bersama para wakilnya dan Bupati Budhi Sarwono dalam rapat paripurna Dewan, Jumat (27/11).

Sebelumnya, 8 fraksi secara bergantian menyampaikan pendapat akhir disertai berbagai kritik dan saran. Rancangan tersebut

selanjutnya diimintakan pengesahan kepada gubernur Jawa Tengah.

Postur Rencana APBD Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2021 terdiri Pendapatan Daerah Rp 2,108 triliun lebih. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp 287,492 miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,689 triliun lebih dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 131,840 miliar. Belanja Daerah direncanakan Rp 2,176 triliun lebih, terdiri Belanja Operasi Rp 1,465 triliun lebih, Belanja Modal Rp 317,898 miliar lebih, Belanja Tidak Terduga Rp 3 miliar dan Belanja Transfer Rp 389,083 miliar. Untuk Pembiayaan Daerah, mencakup Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 75 miliar, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 7,900 miliar, dan Pembiayaan Netto Rp 67,100 miliar.

Budhi Sarwono mengatakan, sebelum Raperda APBD 2021 disetujui, telah

dilaksanakan koordinasi dan pembahasan yang intensif antara eksekutif dan legislatif. "Ini merupakan upaya agar dalam menyusun anggaran daerah dapat lebih informatif, partisipatif, transparan dan mudah dimengerti," jelasnya, Senin (30/11).

Ditambahkan pula, dalam penyusunan APBD tahun 2021 Kabupaten Banjarnegara sudah menggunakan aplikasi Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Juru bicara fraksi Partai Golkar, Bawono, dalam pendapat akhir fraksi antara lain mengharapkan postur APBD 2021 agar mengurangi belanja pegawai untuk dialihkan pada

kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat di seluruh sektor, baik pertanian, UMKM, perdagangan dan industri.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Solahudin meminta agar sasaran program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat. "Pemkab perlu melakukan verifikasi dan validasi data untuk pedoman data terpadu program pengentasan kemiskinan," katanya.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya Achmad Salabi mengatakan, berkait informasi yang menyebut rumah-rumah sakit di Banjarnegara penuh karena lonjakan pasien Covid-19, Pemkab perlu mengambil langkah-langkah strategis secara masif. "Kami menyadari betapa sulit menyelenggarakan antara upaya mendorong roda ekonomi agar terus berputar dengan upaya menyelematkan nyawa warga di tengah pandemi seperti ini," ujarnya. (Mad)



Ketua DPRD Banjarnegara Ismawan Setya Handoko (kanan) menyerahkan dokumen persetujuan Dewan terhadap rancangan APBD 2021 kepada Bupati Budhi Sarwono.

LATIHAN PRAJA BHAKTI TARUNA AKMIL

Wujud Integrasikan Ilmu di Masyarakat

MAGELANG (KR) - Upaya mewujudkan komitmen membebaskan masyarakat Kota Magelang dari kekumuhan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, dengan pemetaan semua wilayah, baik di wilayah Kecamatan Magelang Utara, Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan. Karena wilayah Kota Magelang relatif kecil, sehingga harus indah, harus maju, harus bersih, supaya rakyat bahagia.

Demikian disampaikan Walikota Magelang Ir H Sigit Widyonidito MT usai upacara pembukaan Latihan Praja Bhakti Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Taruna Akmil Tingkat II dan III Tahun Pendidikan 2020/2021 di Kota dan Kabupaten Magelang, Senin (30/11) di halaman Kantor Bakorlin Wilayah II di Magelang. Upacara dihadiri Gubernur Akmil Mayjen TNI Totok Imam Santoso SIP SSos MTr(Han).

Upacara pembukaan juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang Nanda Cahyadi Priyadi, Komandan Resimen Taruna (Danmentar) Akmil Brigjen TNI Windiyatno, Kapolres Magelang Kota AKBP Nugroho Ari Setyawan, Kasdim 0705/Magelang Mayor Inf Sudarno, Sekretaris Daerah Kota Magelang Drs Joko Budiyo MM, dan Kabag Ops Polres Magelang Kumpul Marjadi.

Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) Dr Suliswiyadi MAG mengatakan kegiatan ini merupakan realisasi penerapan pengetahuan dan keterampilan para taruna selama pendidikan. Kegiatan ini juga wujud integrasi masyarakat dan taruna. Sebanyak 888 peserta mengikuti latihan. Mereka terdiri Taruna Tingkat II 362 orang dan Taruna Tingkat III 296 orang, serta pengasuh taruna dan dosen. (Tha)

HUKUM

Polisi Bubarkan Balap Liar



KR-Driyanto

Polisi Satlantas bubarkan balap liar.

PURWOKERTO (KR) - Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyumas membubarkan balap liar di Jalan Bung Karno Purwokerto. Jalan sepanjang 1,7 kilometer tersebut tiap sore selalu ramai untuk ajang balap liar. Kegiatan itu mengakibatkan kerumunan orang

di area tersebut. "Polisi yang mendapat informasi dari masyarakat, terus melakukan membubarkan kegiatan yang berkumpulnya massa," jelas Kasat Lantas Polresta Banyumas, AKP Ryke Rhimadila, Minggu (29/11).

Menurutnya ketika polisi datang ke lokasi

masih ada beberapa pemuda yang kumpul dan trek-trekan. "Kami beri tindakan persuasif dulu dengan teguran untuk tidak mengulangi lagi," ungkapnya. Namun jika mereka mengulangi lagi polisi akan bertindak tegas dan memanggil orangtuanya. (Dri)

Seorang IRT Nekat Gantung Diri

WONOSARI (KR) - Ny Khotijah (51) warga Padukuhan Bendo, Krambilawati, Saptosari Gunungkidul, ditemukan gantung diri di pohon jati sebuah perkebunan tak jauh dari rumahnya, kemarin. Dari keterangan warga setempat, Korban nekat menghabisinya sendiri diduga karena terhimpit ekonomi.

Dukuh Bendo, Endi Suryanto, mengatakan peristiwa bermula ketika korban meninggalkan rumah. Namun saat itu pihak keluarga tidak menaruh curiga karena ia memiliki kebiasaan pergi ke tempat saudara.

"Baru pada malam hari keluarga curiga, karena setelah mencari di rumah kerabat tidak ada," terang Endi.

Pencarian terhadap Ny Khotijah kemudian dilakukan dari sore hingga pada pagi hari dan akhirnya pihak keluarga berinisiatif untuk memperluas area pencarian. Ketika mereka sampai di salah satu perkebunan jati menemukan Ny Khotijah

sudah dalam kondisi tidak bernyawa gantung diri di pohon jati.

Korban ditemukan sekitar pukul 05.30 di Alas Kuwang yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah korban. Selama ini korban setiap harinya tinggal bersama suami karena anaknya pergi bekerja. Diduga, masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab korban mengakhiri hidup. "Diduga korban juga mengalami depresi akibat himpitan ekonomi dan kasus ini sudah ditangani oleh Polsek dan Puskesmas," imbuhnya.

Kasubag Humas Polres Gunungkidul Iptu Suryanto ketika dihubungi membenarkan kejadian tersebut, dari hasil pemeriksaan petugas dan tim dokter puskesmas setempat tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Korban dinyatakan tewas akibat gantung diri di pohon jati. Usai diperiksa jenazahnya langsung diserahkan pihak keluarganya untuk dimakamkan. (Bmp)

DIDUGA MEMBAWA KABUR UANG

Mantan Kades Diperiksa Kejaksaaan

SLAWI (KR) - Diduga membawa kabur uang ganti rugi jalan tol sebesar Rp 800 juta, mantan Kepala Desa Penarukan Adiwerna Kabupaten Tegal, ZA (40), harus berurusan dengan pihak berwajib. Kini kasus itu masih ditangani pihak Kejaksaan Negeri setempat.

Kajari Kabupaten Tegal Mulyadi SH didampingi Kasi Pidus Samsu Yoni SH, menyatakan dari BAP yang berhasil diselesaikan penyidik Reskrim Polres Tegal, terkuak bahwa yang bersangkutan sempat menggunakan uang ganti rugi tanah bengkok tersebut sebesar Rp 800 juta.

"Sisa uang yang berhasil disita tinggal Rp 200 juta. Aksi itu dilakukan yang bersangkutan pada tahun 2018 silam," ujar Mulyadi

Senin (30/11).

Mulyadi mengungkapkan, sisa uang tersebut berhasil diamankan dari tangan tersangka lantaran masih tersimpan di buku tabungan BRI. Yang bersangkutan, sempat menguasai tanah bengkok desa seluas 3.000 meter persegi dan mendapatkan ganti rugi kurang lebih Rp 800 juta akibat proyek jalan tol.

"Uang ganti rugi tersebut digunakan yang bersangkutan sekitar Rp

500 juta untuk berbisnis dengan rekannya. Dari pengakuan yang bersangkutan, ZA tertipu dari bisnis yang sempat dijalannya," tegas Mulyadi.

Dari kasus itu, tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya kasus ini sempat ditangani Inspektorat Kabupaten Tegal, sebelum akhirnya diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Tersangka sebelumnya,

sempat masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) Polres Tegal. Saat menjabat sebagai Kades Penarukan, yang bersangkutan sudah lama mangkir dari tugasnya memimpin desa sejak bulan April 2018.

Kemudian, dari Inspektorat telah membuat laporan pada 16 Juli 2018. Saat itu, Plt Bupati Tegal, Umi Azizah, mendisposikannya pada 20 Juli 2018. Berdasarkan hal itu, pihak terkait pun berusaha melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Hingga kasus itu sampai kemeja Kejari Tegal. (Ryd)

23 Ribu Jamu Palsu Dibakar

SEMARANG (KR) - Sebanyak 23 ribu kemasan jamu tradisional palsu hasil sitaan Dit Serse Narkoba Polda Jateng, Senin (30/11), dimusnahkan dengan cara dibakar di Krematorium Kedungmundu, Semarang. Barang bukti jamu berbagai merek tersebut hasil pengungkapan kasus pabrik pembuatan obat dan jamu ilegal di Desa Gentasari Kroya Cilacap. Kasus ini menyeret 2 tersangka berinisial AR (55) dan EH (27).

Kabid Humas Kombes Pol Iskandar mengatakan pemusnahan barang bukti setelah tertangkap dan mendapat izin dari pengadilan. "Ini pelakunya sudah tertangkap dan perkaranya sudah P21 pada 24 November kemarin, dan besok mungkin sudah tahap kedua," jelasnya.

Barang bukti total sebanyak 23.068 kapsul yang terdiri dari berbagai jenis mulai dari madu, bubuk, kopi hingga obat kuat yang dilekati izin edar palsu.

"Pelaku dijerat Pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 15 tahun penjara," jelasnya.

Direktur Diresnarkoba Polda Jateng, Kombes Pol Ig Agung Prasetyoko, menambahkan dengan memusnahkan barang bukti

tersebut mampu menyelamatkan 40 juta jiwa warga. "Barang bukti itu bila dikonsumsi sangat berbahaya. Semua fiktif palsu. Ini tidak sesuai dengan standar farmasi kesehatan dan tidak memiliki izin peredaran," jelasnya.

Hal serupa disampaikan

Kasubid Kimbiofor Jateng AKBP Arif Budiartono. Ia mengatakan mengkonsumsi jamu tradisional palsu sangat berbahaya. Dengan dosis yang tidak terukur dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal hingga berujung sakit dan kematian. (Cry)



Barang bukti jamu palsu sebelum dimusnahkan dengan cara dibakar.

KR-Karyono